

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025
KOTA PEKALONGAN**



**BPBD KOTA PEKALONGAN
JL. SRIWIJAYA NO.5B, BENDAN, PEKALONGAN BARAT
KOTA PEKALONGAN
(0285) 4151508**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggung Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggung Bencana Daerah Kota Pekalongan 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggung Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Badan Penanggung Bencana Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.

Pekalongan, 1 Agustus 2024
Kepala Pelaksana
BPBD KOTA PEKALONGAN



APRILYANTO DWI PURNOMO, S.E., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670423 198603 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD KOTA PEKALONGAN TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kota Pekalongan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekalongan	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Pekalongan	16
2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja	16
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	16
2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi	17
2.3.4 Tantangan dan Peluang	17
2.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KOTA PEKALONGAN	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
1. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	29
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).....	31
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA PEKALONGAN.....	43
BAB V PENUTUP	46
5.1 Catatan Penting.....	46
5.2 Kaidah Pelaksanaan	46
5.3 Rencana Tindak Lanjut	47

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) BPBD Kota Pekalongan	9
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekalongan	13
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BPBD Kota Pekalongan .	19
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 BPBD Kota Pekalongan	26
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 BPBD Kota Pekalongan	35
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 disusun dengan mengacu

pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis BPBD Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan BPBD Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026
 13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan
 14. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja BPBD Kota Pekalongan tahun 2025 dimaksudkan untuk dan menyalurkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2025. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan

persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja BPBD adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan BPBD Kota Pekalongan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban BPBD Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, penjelasan jika rumusan program/ kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 memuat 2 (dua) program 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran senilai Rp. 3.408.746.000,- . Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan, kegiatan yang terealisasi dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-Perubahan) Kota Pekalongan tahun 2023 adalah 2 (dua) program 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 3.678.731.000,- Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi “Sangat Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 91-100%, “Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 75-90%, “Sedang” yaitu capaian berkisar antara 65-75%, “Rendah” yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan “Sangat Rendah” yaitu capaian di bawah 50%.

Perbandingan Renja 2023 dan APBD Perubahan 2023

No	Keterangan	Renja 2023	APBD Perubahan 2023
1	Jumlah Program	2	2
2	Jumlah Kegiatan	9	9
3	Jumlah Sub Kegiatan	28	28
4	Pagu Indikatif/ Anggaran	3.408.746.000	3.678.731.000

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja BPBD Kota Pekalongan tahun 2023, terdapat 25 sub kegiatan dengan status capaian “Sangat Tinggi”, 3 sub kegiatan dengan status capaian “Tinggi”.

Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan, terdapat 9 kegiatan yang dengan status capaian “Sangat Tinggi”

Berdasarkan capaian kinerja program (hasil/ outcome), pada tahun 2023 terdapat 2 indikator kinerja program telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Sedangkan pada capaian IKU Renstra dengan indikator Persentase korban bencana yang ditangani, telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja adalah terbatasnya sarana prasarana yang ada. Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja adalah semakin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Implikasi atau dampak yang timbul terhadap capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah diperlukan dukungan yang lebih baik dari sisi anggaran, sarpras maupun kebijakan untuk mendukung pencapaian program tersebut.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d (tahun berjalan)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

No.	Indikator Indikator/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi 2021	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s/d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6				10	11
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas										
	persentase korban bencana alam yang ditangani	Persen	80	75	55,51	75	75	75	100	Tercapai
	peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	Persen	33,33	33,33	166,67	33,33	33,33	33,33	100	Tercapai
	- Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	jenis	3	3	3	3	3	3	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	kali	2	2	4	2	2	2	100	Tercapai
	- Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi	kali	1	1	1	1	0	0	0	Belum Tercapai
	- jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun	dokumen	0	0	0	1	1	1	100	Tercapai

	- Jumlah perahu karet yang diadakan	unit	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai
	- jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	kejadian	5	5	4	4	4	4	100	Tercapai
	- jumlah bulan ketersediaan logistik	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	unit	11	11	1	5	5	5	100	Tercapai
	- jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana	orang	200	200	140	200	200	200	100	Tercapai
Urusan Rutin										
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai

	- jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	org/kali	30	30	30	50	50	50	100	Tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- jumlah gedung kantor yang	unit	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai

	terpelihara secara rutin/berkala										
	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	12	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
	- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	11	11	10	10	10	10	10	100	Tercapai
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah pakaian adat yang diadakan	stel	6	6	6	1	1	1	1	100	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen	6	6	6	6	6	6	6	100	Tercapai
	- Jumlah Dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKjIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD Yang disusun	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	100	Tercapai
	- Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	100	Tercapai

	evaluasi Perangkat Daerah									
	- Jumlah dokumen SPIP (1 Dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	Tercapai
5	Persentase capaian aparatur berkompeten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	orang	40	40	40	40	40	40	100	Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada BPBD Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis BPBD Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan BPBD Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan data Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2023, realisasi capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
			Target	Realisasi	
1	Persentase korban bencana yang ditangani	%	100	100	100
2	Nilai Evaluasi AKIP	indeks	75,5	75,35	99,80
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	90	80,58	89,53
	Rata-rata				99,44

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut diatas terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,44% atau dikategorikan baik.

Kendala dalam mencapai target yang direncanakan adalah karena kurangnya dukungan personil maupun anggaran bagi korban bencana, serta semakin meningkatnya intensitas bencana yang terjadi di Kota Pekalongan. Selanjutnya hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-C.30. sebagai berikut:

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-	-	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-	-	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-	-	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	
4	Persentase korban bencana yang ditangani	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	72,5	72,88	73	74	100%	100%	100%	100%	
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	90	90	80	81	68,41%	80,58%	100%	100%	
7	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	74	74	74,5	-	-	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana pada Pemerintah Kota Pekalongan, BPBD Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, BPBD Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi ke-7 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government”** dengan Tujuan **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**.

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, BPBD Kota Pekalongan menetapkan 3 indikator kinerja guna mengukur tingkat keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan. Indikator Kinerja dan capaian yang dihasilkan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Persentase korban bencana yang ditangani, dengan capaian 100%
- 2) Nilai Evaluasi AKIP, dengan capaian 99,80%
- 3) Nilai Keterbukaan Informasi Publik, dengan capaian 80,58%

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kota Pekalongan yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana

2. SDM yang dimiliki masih terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi bidang kebencanaan
3. Minimnya stock logistik dan belum sebanding dengan jumlah proyeksi/ potensi masyarakat terdampak bencana
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan bencana dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
5. Belum maksimalnya koordinasi manakala terjadi bencana
6. Minimnya sarana prasarana penanggulangan bencana
7. Belum adanya pedoman dan dokumen Penyelenggaraan Bencana, Petunjuk/ Rambu-rambu kebencanaan , shelter pengungsi
8. Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.
9. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
10. Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
11. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
12. Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran
13. Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.
14. Belum optimalnya dukungan SDM
15. Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Penanggulangan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini BPBD Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik BPBD Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 kinerja BPBD Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance dan clean government*”,

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Adapun yang menjadi tantangan organisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kota Pekalongan yang termasuk dalam kategori **Sedang**, dengan skor 122,75, hal tersebut tertuang dalam buku Indeks Resiko Bencana BNPB Tahun 2023;

- b. Letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam terutama banjir, rob, kebakaran, kekeringan, angin ribut/ angin puting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial;
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun menjadi urusan yang penting dalam pembangunan. Keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- d. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;
- e. Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana;
- f. Adanya keterbatasan sarana prasarana kantor maupun sarana prasarana penanggulangan bencana;
- g. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpanan bahan logistik bencana maupun peralatan sesuai standar penyimpanan barang/logistik secara representative, yang berdampak pada rusaknya stok logistik ataupun berkurangnya umur ekonomis sarpras PB bahkan hilang;
- h. Belum adanya PUSDALOPS (Pusat Pengendalian dan Operasi) sebagai pusat data dan informasi;
- i. Terbatasnya alokasi anggaran serta Penganggaran dalam kebencanaan yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- j. Minimnya data rawan bencana dan basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib,
- k. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- l. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan yang cukup tinggi, akan tetapi belum adanya standarisasi terutama bagi relawan;
- m. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana.

Selain itu tantangan yang mendasar dan kerangka penentuan arah pembangunan Kota Pekalongan adalah terkait urusan banjir dan rob. Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan kajian dan analisis kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan masyarakat yang dibutuhkan. Selain itu diperlukan pula pembentukan forum PRB serta adanya Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana

Peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kota Pekalongan antara lain :

- a. Terbitnya UU No. 27 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah kota pekalongan nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadikan peluang penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin luas, tidak terbatas pada pemerintah tetapi juga dari peran masyarakat dan dunia usaha;
- b. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- c. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- d. Terbukanya pengembangan kapasitas BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional
- e. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar BPBD Kota Pekalongan dengan masyarakat.
- f. Adanya peran serta masyarakat, LSM dalam penanggulangan bencana.
- g. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian / lembaga teknis.
- h. Adanya kesempatan pengembangan ketrampilan melalui diklat maupun bintek bagi personil BPBD
- i. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana;
- j. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
- k. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana dari APBD;
- l. Pendanaan dalam penanggulangan bencana dari berbagai sumber masih sangat terbuka dan banyak, yaitu selain pendanaan dari pemerintah dapat pula berasal dari pendanaan masyarakat, lembaga maupun dunia usaha.
- m. Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu:

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang

2.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan dan pengidentifikasi isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan .

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan yang ada, perumusan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana di Wilayah Kota Pekalongan;
2. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2025, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kota Pekalongan tahun 2025. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut.

Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan dan penyesuaian target dan indikator kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.31. sebagai berikut :

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 BPBD Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.164.491.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.481.638.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD Kota Pekalongan	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	1.867.937.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD Kota Pekalongan	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	2.192.138.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah	
			2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 persen				2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 persen			
			3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100 persen				3. Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100 persen			
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>BPBD Kota Pekalongan</i>	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>100 persen</i>	<i>24.625.000</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>BPBD Kota Pekalongan</i>	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>100 persen</i>	<i>17.984.000</i>	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja yang disusun	1 dokumen	9.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja yang disusun	1 dokumen	4.863.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan	

											kemampuan daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.148.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	13.625.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	12.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
			Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen				Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen		
			Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan				Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan		
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen				Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.457.402.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.673.054.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15 orang	1.424.352.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15 orang	1.638.090.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	31.550.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	33.900.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	1.064.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	1.797.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	22.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik	2 kali	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik	2 kali	9.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	40 orang	10.297.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	50 orang	12.500.000	Di Tahun 2025 Pegawai di BPBD sejumlah 50 orang
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	133.516.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	177.700.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.800.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	58.400.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	58.400.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan semula 10 unit menjadi 17 unit dikarenakan pembelian peralatan dengan koefisien harga lebih rendah
			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 unit				Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	17 unit		
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	5.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	4.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	29.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	27.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	9.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBD Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBD Kota Pekalongan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 laporan	26.416.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 laporan	75.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	98.804.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	125.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	1.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	56.904.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	68.400.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	40.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	55.600.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	133.793.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	175.900.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	11 unit	79.859.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	11 unit	112.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	9.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	20.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	57 unit	44.434.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	57 unit	43.900.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Pekalongan	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100%	1.296.554.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Pekalongan	persentase korban bencana alam yang ditangani	100%	1.289.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
A	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i>	<i>100 persen</i>	<i>64.945.000</i>	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)</i>	<i>100 persen</i>	<i>44.700.000</i>	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	1 dokumen	0	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	1 dokumen	0	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Pekalongan	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	3 jenis	64.945.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Pekalongan	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	3 jenis	44.700.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
			Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 kali				Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 kali		
			Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi	1 kali				Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi	1 kali		

B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Pekalongan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	95.475.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Pekalongan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen	116.700.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah personil/ relawan/ pokmas/pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana	200 orang	62.400.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana	200 orang	46.700.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Pekalongan	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	3 unit	33.075.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Pekalongan	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	3 unit	70.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pekalongan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	996.556.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pekalongan	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen	1.050.600.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	12 bulan	846.556.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	12 bulan	981.900.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	4 kejadian	150.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	4 kejadian	68.700.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

<i>C</i>	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>Peningkatan Peran Serta Lembaga Masyarakat/Komunitas masyarakat tanggap Bencana</i>	<i>100 persen</i>	139.578.000	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>Peningkatan Peran Serta Lembaga Masyarakat/Komunitas masyarakat tanggap Bencana</i>	<i>100 persen</i>	77.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
1	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	50.000.000	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	37.500.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	89.578.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	40.000.000	Penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana sendiri tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut memuat aktivitas yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kerja holistik-berkesinambungan dengan kerangka menyukseskan pembangunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini BPBD berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penanggulangan bencana, dan memberikan kenyamanan pada warga dari semua faktor – faktor penyebab bencana yang ada di Kota Pekalongan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut penanggulangan bencana serta pembangunan baik pra bencana , tanggap darurat dan pasca bencana secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pencegahan dan penanggulangan bencana dipengaruhi faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, sehingga merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana.

Disamping itu, jumlah penduduk cukup banyak serta penyebaran yang tidak merata, ketimpangan sosial, dan masalah pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, juga sangat rentan terhadap berbagai macam bencana yang tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah manusia.

Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun karena ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial, telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan penanggulangan bencana, antara lain:

- a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.
- b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Misi untuk mewujudkan visi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi penataan wilayah perbatasan, wilayah administrasi dan nama rupabumi (toponimi);
- c. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kawasan dan otorita serta percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Isu-isu strategis dalam rangka penanggulangan bencana antara lain:

- a. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis, tetap menjadi ancaman yang serius.
- b. Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik
- c. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan
- d. Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana
- e. Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Masih perlu peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana
- g. Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk tahapan pencegahan dan tahapan pemulihan pascabencana
- h. Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan
- i. Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian
- j. Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian
- k. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam
- l. Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran
- m. Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas
- n. Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan.
- o. Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 - 2045

yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan.

Misi BNPB 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
- b. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- c. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- d. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
- b. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- c. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- d. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran Strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
- b. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
- c. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Arah Kebijakan BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2020-2024) adalah:

- a. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
- b. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
- c. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
- d. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
- e. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan

sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.

- f. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Jawa Tengah menjadi daerah yang rawan bencana. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Prov Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah sekaligus wujud dan peran serta BPBD Prov Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov Jawa Tengah 2018-2023.

Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut
- b. Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- c. Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana
- d. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat system peringatan dini (EWS) dan rambu petunjuk jalur evakuasi
- e. Masih terdapat 2 (dua) kota yang belum membentuk BPBD berdasarkan Perda, sehingga menghambat fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota tersebut;
- f. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota
- g. Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung PB
- h. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah
- i. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
- j. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah
- k. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jateng

- l. peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana
- m. masih perlunya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah

Tujuan BPBD Prov. Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana,
- b. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai BPBD Prov Jawa Tengah antara lain:

- a. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
- b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
- c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
- f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran BPBD Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. a. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
- b. Sasaran : 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- 2) Meningkatnya upaya penanggulangan bencana

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran BPBD Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekalongan selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	82,93
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Nilai SAKIP OPD	77
		b. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	b. persentase korban bencana yang ditangani	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarnya. Hal ini terlihat dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 3.531.489.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BPBD Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.564.489.000	DAU			3.370.513.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	2.082.849.000	DAU		100 persen	2.067.004.000
		2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah		100 persen				100 persen	
		3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		100 persen				100 persen	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>BPBD Kota Pekalongan</i>	<i>100 persen</i>	<i>17.984.000</i>	<i>DAU</i>		<i>100 persen</i>	<i>17.722.000</i>

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BPBD Kota Pekalongan	1 dokumen	4.836.000	DAU		2 dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPBD Kota Pekalongan	2 dokumen	1.148.000	DAU		2 dokumen	1.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	BPBD Kota Pekalongan	5 laporan	12.000.000	DAU		5 laporan	13.722.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	1.722.562.000	DAU		100 persen	1.509.642.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BPBD Kota Pekalongan	15 orang/bulan	1.687.598.000	DAU		15 orang/bulan	1.476.592.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	BPBD Kota Pekalongan	12 dokumen	33.900.000	DAU		12 dokumen	31.550.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	BPBD Kota Pekalongan	1 laporan	1.064.000	DAU		1 laporan	1.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	16.070.000	DAU		100 persen	22.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	BPBD Kota Pekalongan	2 paket	7.070.000	DAU		2 paket	9.500.000

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	BPBD Kota Pekalongan	50 orang	9.000.000	DAU		50 orang	12.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	92.900.000	DAU		100 persen	182.400.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	1 paket	1.320.000	DAU		1 paket	2.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	7 paket	7.990.000	DAU		7 paket	58.400.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 paket	730.000	DAU		12 paket	5.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 paket	19.710.000	DAU		12 paket	30.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 paket	6.570.000	DAU		12 paket	9.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	24 dokumen	1.830.000	DAU		24 dokumen	2.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPBD Kota Pekalongan	100 laporan	54.750.000	DAU		100 laporan	75.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD Kota Pekalongan	100 persen	113.683.000	DAU		100 persen	125.840.000

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Kota Pekalongan	12 laporan	1.100.000	DAU		12 laporan	1.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 laporan	58.313.000	DAU		12 laporan	68.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BPBD Kota Pekalongan	12 laporan	54.270.000	DAU		12 laporan	55.640.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>BPBD Kota Pekalongan</i>	<i>100 persen</i>	<i>119.650.000</i>	DAU		<i>100 persen</i>	<i>209.400.000</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	BPBD Kota Pekalongan	11 unit	73.000.000	DAU		11 unit	115.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPBD Kota Pekalongan	2 unit	14.600.000	DAU		2 unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPBD Kota Pekalongan	57 unit	32.050.000	DAU		57 unit	44.400.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	Kota Pekalongan	100 persen	1.481.640.000	DAU		100 persen	1.303.509.000
	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>100 persen</i>	<i>51.180.000</i>	DAU		<i>100 persen</i>	<i>65.926.000</i>

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Pekalongan	100 orang	51.180.000	DAU		100 orang	65.926.000
	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>100 persen</i>	<i>873.940.000</i>	DAU		<i>100 persen</i>	<i>946.610.000</i>
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, amupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kota Pekalongan	3 unit	10.830.000	DAU		3 unit	100.000.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Pekalongan	100 Kawasan	863.110.000	DAU		100 Kawasan	846.610.000
	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>100 persen</i>	<i>510.890.000</i>	DAU		<i>100 persen</i>	<i>150.040.000</i>
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Kota Pekalongan	1 dokumen	125.040.000	DAU		1 dokumen	125.040.000

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kota Pekalongan	2500 orang	385.850.000	DAU		2500 orang	25.000.000
	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/ komunitas masyarakat tanggap bencana</i>	<i>Kota Pekalongan</i>	<i>100 persen</i>	<i>45.630.000</i>	DAU		<i>100 persen</i>	<i>140.933.000</i>
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	Kota Pekalongan	1 dokumen	27.380.000	DAU		1 dokumen	50.000.000
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kota Pekalongan	4 kegiatan	18.250.000	DAU		4 kegiatan	90.933.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama BPBD Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab BPBD Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Rencana Kerja BPBD Kota Pekalongan Tahun 2024 terdapat 2 Program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan/ sub kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan/ sub kegiatan. Perumusan kegiatan/ sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan BPBD Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3.564.489.000		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.082.849.000	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
			2. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	100 persen
			3. Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	17.984.000	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100 persen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.836.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.148.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.722.562.000	<i>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 persen
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.598.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.900.000	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.064.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
C	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	16.070.000	<i>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100 persen
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.070.000	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang
D	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	92.900.000	<i>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</i>	100 persen
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.320.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.990.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	730.000	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.710.000	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 paket
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.570.000	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.830.000	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dokumen
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.750.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan

E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.683.000	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.313.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.270.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.650.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.000.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.600.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.050.00	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	57 unit
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.481.640.000	persentase korban bencana alam yang ditangani	100%
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	51.180.000	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	51.180.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 orang
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	873.940.000	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen
1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	10.830.000	jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, amupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3 paket
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	863.110.000	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 orang
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	510.890.000	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	125.040.000	jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	385.850.000	jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2500 orang
D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	45.630.000	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	100 persen
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	18.250.000	jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah	1 dokumen
2	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	27.380.000	jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	4 kegiatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam kebencanaan yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BPBD Kota Pekalongan tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Substansi Renja BPBD Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2025 dan Renstra BPBD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.
- b. BPBD Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
- c. BPBD Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang berpedoman kepada Renja

BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPBD Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 1 Agustus 2024
Kepala Pelaksana
BPBD KOTA PEKALONGAN



APRIYANTO DWI PURNOMO, S.E., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670423 198603 1 003